

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah wilayah yang luas dengan ribuan pulau dengan situasi budaya, sosial dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sistem pembangunan wilayah yang lebih efektif (Ningtyas and Widyawati, 2015). Secara khusus, perkembangan akuntan publik di Indonesia berkembang dengan cepat seiring dengan era reformasi dalam pelaksanaan desentralisasi yang berpusat pada kebijakan pemerintah, otonomi daerah, dan desentralisasi.

Selain itu, kemajuan globalisasi yang menuntut daya saing setiap negara juga menjadi tuntutan daya saing seluruh pemerintah daerah. Dengan adanya daya saing ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai kemandirian pemerintah daerah yang lebih besar. Pemerintah Indonesia sudah membuat standar akuntansi yang dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi ini berupa pernyataan standar akuntansi pada sektor publik yang memberikan perumusan rinci mengenai unsur-unsur standar akuntansi. Pernyataan ini disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat dan menampilkan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah akan dilaporkan kepada DPR/DPRD dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 71 Tahun 2010. Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pemberlakuan peraturan Pemerintah SAP diharapkan dapat mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Standar akuntansi pemerintah merupakan aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah digunakan baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah dan instansi-instansi lainnya. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sesuai pada kerangka waktu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, seperti yang diatur oleh Keputusan No. 71 Tahun 2010, diatur bahwa 2014 adalah tahun terakhir pemerintah bisa menggunakan basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015, pemerintah pusat dan daerah perlu menggunakan akuntansi berbasis akrual saat menyajikan laporan keuangan.

Sangatlah penting bahwa pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik, termasuk pengelolaan yang baik dan kepatuhan terhadap prinsip. Indikator kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi and Suhardjo, 2013). Pelaporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, mudah dipahami dengan karakteristik kualitatif sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar SAP. Kualitas pelaporan

keuangan juga dapat ditentukan oleh opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut tingkat kedisiplinan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pendapat kepatuhan BPK terdiri dari lima jenis opini berdasarkan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat.

Pemerintah Kota Jayapura selama dipimpin oleh Dr. Benhur Tommy Mano, MM, sudah menerima opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 7 kali berturut-turut berdasarkan penilaian yang dilakukan perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa permasalahan masih ditemukan yaitu antara lain penyusunan laporan keuangan belum berdasarkan proses konsolidasi, dua penatausahaan aset tetap belum tertib, kebersihan tidak tertib, dan keempat penambahan pekerjaan sebagai kompensasi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi tidak sesuai ketentuan. Selain itu terdapat kesalahan yang sama yang hampir setiap tahun dikoreksi oleh tim penilaian yaitu terkait aset dan akuntansi.

Dalam konteks penelitian ini fenomena yang terjadi pada pemerintah Kota Jayapura yaitu meskipun Kota Jayapura sudah meraih opini keuangan WTP sebanyak 7 kali namun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) masih saja ada catatan atau koreksi yang hampir setiap tahun rekomendasinya sama terutama terkait aset dan akuntansi. Hal ini menggambarkan kurang efektifnya implementasi penyusunan sistem akuntansi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Implementasi penyusunan sistem akuntansi. Standar akuntansi pemerintahan merupakan 5 persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas

laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Berikut data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Papua atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kota Jayapura terkait Penatausahaan Aset Tetap yang Belum Tertib dari tahun 2019&2020 yang disajikan:

Tabel 1.1 Rincian Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Tanah	820.576.017.531,24	801.114.530,24	19.462.003.001,00
2	Peralatan dan Mesin	377.269.160.365,80	348.835.952.798,99	28.433.207.566,81
3	Gedung dan Bangunan	1.107.495.327.879,69	1.090.118.767.484,78	17.376.560.394,91
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	945.647.341.858,13	831.691.846.802,10	113.955.495.056,03
5	Aset Tetap Lainnya	11.124.380.641,26	7.521.978.274,26	3.602.402.367,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	163.669.054.710,00	172.933.923.088,00	(9.264.868.378,00)
Jumlah		3.426.694.282.986,12	3.252.216.482.978,37	174.477.800.007,75
7	Akumulasi Penyusutan	(1.061.617.089.734,63)	(942.655.523.254,40)	(118.961.566.480,23)
Jumlah Aset Tetap		2.364.164.193.251,49	2.309.560.959.723,97	54.603.233.527,51

Sumber: LHP LKPD Kota Jayapura TA.2019

Berdasarkan tabel 1.1 pemerintah Kota Jayapura menyajikan saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.364.164.193.251,49. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.603.233.527,51 atau sebesar 2,36% dibandingkan

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.309.560.959.723,97. KIB peralatan dan mesin untuk kendaraan bermotor hasil pengadaan TA 2019 belum memuat informasi mengenai nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi serta enam nomor BPKB dengan jumlah Rp. 2.340.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Dokumen Persyaratan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) belum disusun. Terkait proses perencanaan kebutuhan BMD di Pemerintah Kota Jayapura, diketahui proses yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Masalah ini bisa mengakibatkan Perencanaan dan Penganggaran belanja barang daerah tidak mencerminkan kebutuhan sesungguhnya. Penelusuran atas pencatatan peralatan dan mesin yang berpotensi gelondongan perolehan dalam tiga tahun terakhir yaitu 2017 s.d. 2019, diketahui atas nilai Rp. 216.835.000,00 merupakan aset murni gelondongan perolehan tahun 2017 dan senilai Rp. 155.939.900,00 yang belum dapat dijelaskan.

Tabel 1.2 Rincian Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5) = (3) – (4)</i>
1	Tanah	821.490.992.531,24	820.576.017.531,24	914.975.000,00
2	Peralatan dan Mesin	402.887.894.618,80	377.269.160.365,80	25.618.734.253,00
3	Gedung dan Bangunan	1.124.156.801.139,69	1.107.495.327.879,69	16.661.473.260,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	961.171.539.018,13	945.647.341.858,13	15.524.197.160,00

5	Aset Tetap Lainnya	13.367.965.928,26	11.124.380.641,26	2.243.585.287,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	201.184.933.397,00	163.669.054.710,00	37.515.878.678,00
Jumlah		3.524.260.126.633,12	3.425.781.282.986,12	98.478.843.647,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.180.235.445.487,92)	(1.061.617.089.734,63)	(118.618.355.753,29)
Jumlah Aset Tetap		2.344.024.681.145,20	2.364.164.193.251,49	(20.139.512.106,29)

Sumber: LHP LKPD Kota Jayapura TA.2020

Dari tabel 1.2 Pemerintah Kota Jayapura menyajikan saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2020 senilai Rp. 2.344.024.681.145,20. Jumlah yang tersaji tersebut menurut sebesar Rp. 20.139.512.106,29 atau sebesar (0,85%) dibandingkan saldo Aset Tetap dalam Neraca audited tahun sebelumnya (atau senilai Rp. 2.364.164.193.251,49).

Pada pemeriksaan kali ini terjadi permasalahan aset lagi pada hal yang sama yaitu KIB peralatan dan mesin untuk kendaraan bermotor hasil pengadaan TA 2020 belum memuat informasi mengenai nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi serta enam nomor BPKB dengan jumlah Rp. 81.292.782.244,34.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada lingkungan pemerintahan Kota Jayapura. Oleh karena itu, penulis ingin menelitinya dalam skripsi yang berjudul: “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo” ditulis oleh Pravitasari Eka Ningtyas dan Dini Widyawati tahun 2015. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, penelitian sebelumnya hanya menggunakan data primer sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, penelitian sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data hanya dengan menggunakan kuisisioner sedangkan penelitian ini menggunakan kuisisioner dan dokumen-dokumen pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah apakah Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat menambah informasi dan menjadi masukan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pembaca, penelitian dapat dijadikan bahan acuan yang nantinya diharapkan bisa bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas

akhir yang berhubungan dengan pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab ini meliputi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan variable penelitian.

BAB VI: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.